



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 22 (dua puluh dua)
Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
Hari, Tanggal	: Rabu, 7 September 2022
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: M.Sarmuji., S.E., M.Si/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: 1. Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023; 2. Pembahasan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022;
Hadir	: 1. 40 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala BSN, Saudara Kukuh S. Achmad; 3. Ketua KPPU, Saudara Ukay Karyadi., S.E., M.E. ; 4. Kepala BP Batam, Saudara Muhammad Rudi; dan 5. Kepala BPKS Sabang, Saudara Junaidi Ali, S.H. S.T. M.T. Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan Kepala Badan Pengawasan Kawasan Sabang (BPKS) pada pukul 10.29 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 7 September 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji., S.E., M.Si.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menyetujui penjelasan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Pagu Anggaran Badan Standardisasi Nasional tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.227.246.074.000,- (*dua ratus dua puluh tujuh miliar, dua ratus empat puluh enam juta, tujuh puluh empat ribu rupiah*) dengan rincian pagu per program sebagai berikut :
 - a. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp88.315.624.000 (*delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
 - b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp138.930.450.000(*seratus tiga puluh delapan miliar embilan ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui penjelasan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Pagu Anggaran Badan Standardisasi Nasional tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.227.246.074.000,- (*dua ratus dua puluh tujuh miliar, dua ratus empat puluh enam juta, tujuh puluh empat ribu rupiah*) dengan rincian pagu per program sebagai berikut :
 - c. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp88.315.624.000 (*delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
 - d. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp138.930.450.000(*seratus tiga puluh delapan miliar embilan ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) atas Realisasi Anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.129.818.177.660,- (*seratus dua puluh sembilan miliar, delapan ratus delapan belas juta, seratus tujuh puluh tujuh ribu, seratus enam puluh rupiah*) atau sebesar 62.95 persen dari Pagu Anggaran sebesar Rp206.212.595.000,- (*dua ratus enam miliar dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*)

4. Komisi VI DPR RI menyetujui penjelasan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Pagu Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp113.129.034.000,- (*seratus tiga belas miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah*) dengan rincian pagu per program sebagai berikut:
 - a. Program Pengawasan Persaingan Usaha menjadi Rp22.078.972.000,- (*dua puluh dua miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), yang difokuskan pada kegiatan penegakan hukum, kajian, advokasi dan kemitraan.
 - b. Program Dukungan Manajemen menjadi Rp91.050.062.000,- (*sembilan puluh satu miliar lima puluh juta enam puluh dua ribu rupiah*)
 - c. Usulan penambahan anggaran KPPU sebesar Rp116.955.021.000,- (*seratus enam belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah*)

5. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas Realisasi Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82.757.775.284,- (*delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*) dari total pagu Rp128.115.648.000,- (*seratus dua puluh delapan miliar seratus lima belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) atau sebesar 64,60% dari total pagu sebesar Rp121.648.842.000,- (*seratus dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

6. Komisi VI DPR RI menyetujui penjelasan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Pagu Anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp2.068.248.980.000,- (*dua triliun enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan rincian pagu per program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp888.770.825.000 (*delapan ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
 - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.179.478.155.000 (*satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*).
7. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam atas Realisasi Anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam Tahun Anggaran 2022 yang mencapai Rp907.887.529.138,- (*sembilan ratus tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*) atau sebesar 42,01 persen dari total pagu Anggaran Rp2.161.377.266.000,- (*dua triliun seratus enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
8. Komisi VI DPR RI menyetujui penjelasan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Pagu Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp66.527.592.000,- (*enam puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian pagu per program sebagai berikut:
 - a. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp30.200.055.000,- (*tiga puluh miliar dua ratus juta lima puluh lima ribu rupiah*).

- b. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp36.327.537.000 (*tiga puluh enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
9. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang atas Realisasi Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang Tahun Anggaran 2022 yang mencapai sebesar Rp33.740.000.000,- (*tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) atau sebesar 43,55 persen dari pagu anggaran sebesar Rp77.473.000.000,- (*tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*)
10. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang TA 2023 sebesar Rp48.774.168.000,- (*empat puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
11. Komisi VI DPR RI mendorong agar Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan (BP) Batam Dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang melakukan sinergitas kegiatan sosialisasi bersama Komisi VI DPR RI.
12. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan (BP) Batam Dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.01 WIB.

**KEPALA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Ttd.

KUKUH S. ACHMAD

**KETUA KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Ttd.

UKAY KARYADI., S.E., M.E

**KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN BATAM**

Ttd.

MUHAMMAD RUDI

**KEPALA BADAN
PENGAWASAN KAWASAN SABANG**

Ttd.

JUNAIDI ALI., S.H., S.T., M.T

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**M. SARMUJI., S.E., MSi
A-318**